



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN TA 2022 *(AUDITED)*

KPKNL JAKARTA V

JALAN KKO USMAN DAN HARUN
NO. 10, SENEN, JAKARTA PUSAT,
DKI JAKARTA

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

KPKNL Jakarta V adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kanwil DJKN DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Jakarta V mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPKNL Jakarta V. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 5 Mei 2023
Plt. Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Des Arman



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	39
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	45
F. Pengungkapan Penting Lainnya	49
VI. Lampiran	51



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA V**

JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10, JAKARTA 10710
TELEPON; (021) 34835146; FAKSIMILE: (021) 34835155

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 5 Mei 2023

Plt. Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Des Arman

Laporan Keuangan KPKNL Jakarta V Tahun Anggaran 2022 *Unaudited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 45.249.249.125,00 atau mencapai 108% dari estimasi pendapatan sebesar Rp 41.711.502.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 2.160.991.719,00 atau mencapai 92% dari alokasi anggaran sebesar Rp 2.355.947.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp 38.363.747.640,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 38.014.965.365,00 Aset Tetap (neto) sebesar Rp 348.782.275,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 37.173.017.420,00 dan Rp 1.190.447.004,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 42.739.871.737,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 2.406.488.321,00 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp 40.333.383.416,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp 40.333.383.416,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp 3.808.062.869,00 ditambah Surplus-LO sebesar Rp 40.333.383.416,00 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0,00 dan dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar Rp (42.950.999.281,00) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp 1.190.447.004,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KPKNL JAKARTA V LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam rupiah)

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	41.711.502.000	45.249.249.125	3.537.747.125	108	51.690.234.000	52.615.701.723	104.305.935.723	102
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	41.711.502.000	45.249.249.125	3.537.747.125	108	51.690.234.000	52.615.701.723	104.305.935.723	108
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BARANG	2.355.947.000	2.160.991.719	(194.955.281)	92	1.995.376.000	1.959.856.934	35.519.066	98
	BELANJA MODAL	0	0	0	0	28.812.000	28.812.000	0	100
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBANUTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANADESA	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	2,355,947,000	2,160,991,719	(194,955,281)	92	2,024,188,000	1,988,668,934	35,519,066	98
C	PEMBIAYAAN				0				0

KPKNL JAKARTA V
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	4,834	0	4,834	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	37,173,017,420	40,405,250,002	(3,232,232,582)	(8.00)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	416,640,000	2,926,022,222	(2,509,382,222)	(85.76)
Persediaan	425,303,111	500,551,527	(75,248,416)	(15.03)
JUMLAH ASET LANCAR	38,014,965,365	43,831,823,751	(5,816,858,386)	(13.27)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	4,008,402,189	3,891,425,315	116,976,874	3.01
Aset Tetap Lainnya	22,852,900	22,852,900	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,682,472,814)	(3,532,789,095)	(149,683,719)	4.24
JUMLAH ASET TETAP	348,782,275	381,489,120	(32,706,845)	(8.57)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	29,118,126	0	29,118,126	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(29,118,126)	0	(29,118,126)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	38,363,747,640	44,213,312,871	(5,849,565,231)	(13.23)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	37,173,017,420	40,405,250,002	(3,232,232,582)	(8.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	37,173,017,420	40,405,250,002	(3,232,232,582)	(8.00)
JUMLAH KEWAJIBAN	37,173,017,420	40,405,250,002	(3,232,232,582)	(8.00)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,190,730,220	3,808,062,869	(2,617,332,649)	(68.73)
JUMLAH EKUITAS	1,190,730,220	3,808,062,869	(2,617,332,649)	(68.73)
JUMLAH EKUITAS	1,190,730,220	3,808,062,869	(2,617,332,649)	(68.73)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	38,363,747,640	44,213,312,871	(5,849,565,231)	(13.23)

KPKNL JAKARTA V
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	42.739.871.737	55.533.434.045	(12.793.562.308)	(23.038)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	42.739.871.737	55.533.434.045	(12.793.562.308)	(23.038)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	42.739.871.737	55.533.434.045	(12.793.562.308)	(23.038)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	230.985.708	119.049.833	111.935.875	94.024
Beban Barang dan Jasa	1.481.920.505	1.346.385.174	135.535.331	10.067
Beban Pemeliharaan	241.099.999	193.866.747	47.233.252	24.364
Beban Perjalanan Dinas	282.233.923	293.874.408	(11.640.485)	(3.961)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

KPKNL JAKARTA V
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	169.964.970	179.968.927	(10.003.957)	(5.559)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2.406.488.321	2.133.145.089	273.343.23	12.814
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	40.333.383.416	53.400.288.956	(13.066.905.540)	(24.47)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	8.289.900	(8.289.900)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	8.289.900	(8.289.900)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	8.289.900	(8.289.900)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	40.333.383.416	53.408.578.856	(13.075.195.440)	(24.481)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	40.333.383.416	53.408.578.856	(13.075.195.440)	(24.481)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KPKNL JAKARTA V
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	3,808,062,869	1,026,516,802	2,781,546,067	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	40,333,383,416	53,408,578,856	(13,075,195,440)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(42,950,999,281)	(50,627,032,789)	7,676,033,508	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,617,615,865)	2,781,546,067	(5,399,161,932)	-
EKUITAS AKHIR	1,190,447,004	3,808,062,869	(2,617,615,865)	-

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis KPKNL Jakarta V

Dasar Hukum KPKNL Jakarta V didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006. Berkedudukan di Jalan Prajurit Usman dan Harun Nomor 10, Jakarta. KPKNL Jakarta V mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran KPKNL Jakarta V diharapkan kualitas laporan Kementerian Negara/Lembaga dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V berkomitmen dengan visi “menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang terpercaya, akuntabel, dan terbaik di tingkat regional untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan” untuk mewujudkan visi terssebut Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V melakukan beberapa langkah – langkah strategis sebagai berikut;

- Mewujudkan pelayanan yang baik secara efektif dan efisien kepada satuan kerja yang berada dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V.
- Memberikan citra positif sebagai perwakilan kementerian Keuangan di daerah kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat di wilayah Jakarta.
- Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang,

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, tugas-tugas seperti penyelesaian mengenai usul penghapusan, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, atau hal-hal lain terkait dengan pengelolaan barang milik negara, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan kekayaan negara lainnya, piutang, dan lelang dari Kementerian Negara/Lembaga selanjutnya ditangani oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Dengan demikian, hingga saat ini Kanwil DJKN DKI Jakarta membawahi 5 (lima) kantor vertikal, yaitu KPKNL Jakarta I, KPKNL Jakarta II, KPKNL Jakarta III, KPKNL Jakarta IV, dan KPKNL Jakarta V.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPKNL Jakarta V. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

KPKNL Jakarta V menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPKNL Jakarta V dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik

yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari KPKNL Jakarta V. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Jakarta V adalah sebagai berikut:

*Pendapatan–
LRA*

(1) Pendapatan–LRA

- Pendapatan–LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan–LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan–LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan–LO

(2) Pendapatan–LO

- Pendapatan–LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan–LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan Pendapatan–LO pada KPKNL Jakarta V adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas I diakui setelah disetor ke Kas Umum Negara;
- Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dari Penanggung Hutang;
- Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji

diakui setelah terbit SP2D untuk pembayaran belanja pegawai berupa gaji PNS;

- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat

dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang **d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar

Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Akuntansi

Pemerintah

Berbasis Akrual

Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja KPKNL Jakarta V memperoleh alokasi anggaran TA 2022 sebesar Rp 2.113.491.000,00. Selama tahun 2022, dilakukan revisi DIPA terkait adanya realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA TA 2022

Uraian	TA 2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Akhir
Pendapatan		
Pendapatan PNPB	41.711.502.000	41.711.502.000
Jumlah Pendapatan	41.711.502.000	41.711.502.000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	2.113.491.000	2.355.947.000
Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	2.113.491.000	2.355.947.000

Realisasi

Pendapatan

Rp

45.249.249.125,00

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 45.249.249.125,00. Pendapatan KPKNL Jakarta V terdiri dari Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I, Pendapatan Bea Lelang Pegadaian, Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil, Pendapatan Anggaran lain-lain serta Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) yang bersumber dari dana mengendap pada rekening bendahara penerimaan. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2022

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			%REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETO	
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	0	0	0	0
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	-	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	0	0	0	0
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan	0				
	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	71.269	0	71.269	
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	27.890.000.000	27.862.200.309	0	27.862.200.309	99,90%
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2.924.000.000	2.873.700.420	0	2.873.700.420	98,28%
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Plutang Negara	10.897.502.000	14.474.392.048	0	14.474.392.048	132,82%
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 4257	41.711.502.000	45.210.364.046	0	45.210.364.046	108,39%
4259	Pendapatan Lain-lain	0				
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	188.885.077	150.000.000	38.885.077	0
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil	0	2	0	2	
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	188.885.077	150.000.000	38.885.079	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	41.711.502.000	45.399.249.123	150.000.000		0,00%
	JUMLAH PENDAPATAN	41.711.502.000	45.399.249.123	150.000.000	45.249.249.125	108,48%

Realisasi Pendapatan TA 2022 mengalami penurunan 14% dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan oleh penurunan yang signifikan pada pendapatan bea lelang pejabat lelang kelas I dan bea lelang pegadaian karena berkurangnya jumlah lelang yang laku.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	8.289.900	(100,00)
Pendapatan Bea Lelang Kelas I	27.862.200.309	31.433.342.182	(11,36)
Pendapatan Biaya Adm Pengurusan Piutang Negara	14.474.392.048	13.596.851.363	6,45
Pendapatan Jasa Lainnya	-	49.541.317	(100,00)
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	2.873.700.420	4.339.499.498	(33,78)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	71.269	83.888	(15,04)
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil	2	-	0,00
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	38.885.077	3.188.093.575	(98,78)
Jumlah	45.249.249.125	52.615.701.723	(14,00)

Realisasi Belanja Negara
Rp
2.160.991.719,00

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2022 adalah sebesar Rp 2.160.991.719,00 atau 92% dari anggaran belanja sebesar Rp 2.355.947.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

NO	URAIAN	TA 2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6
	BELANJA				
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0
	BELANJA BARANG	2.355.947.000	2.160.991.719	(194.955.281)	92
	BELANJA MODAL	0	0	0	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA	2.355.947.000	2.160.991.719	(194.955.281)	92

Realisasi Belanja TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 8,67 % dibandingkan dengan TA 2021. Hal ini disebabkan adanya peningkatan belanja nonoperasional berupa kenaikan honorarium wakil kerja penjaga aset eks BPPN dan belanja untuk mendukung aktivitas perkantoran dan pemeliharaan atas aset yang dimiliki sehingga pelayanan dan aktivitas perkantoran dapat berjalan dengan baik.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	0,00
Belanja Barang	2.160.991.719	1.959.856.934	10,26
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
Belanja Modal	-	28.812.000	100,00
Jumlah	2.160.991.719	1.988.668.934	8,67

Belanja Pegawai

Rp 0

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Hal ini disebabkan oleh sentralisasi belanja pegawai pada Kantor Pusat DJKN. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	0,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	0,00
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	0,00
Belanja Tunj. Anak PNS	-	-	0,00
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	0,00
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	-	0,00
Belanja Tunj. PPh PNS	-	-	0,00
Belanja Tunj. Beras PNS	-	-	0,00
Belanja Uang Makan PNS	-	-	0,00
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	-	-	0,00
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	-	0,00
Belanja Lembur	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0,00
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	-	0,00

Belanja Barang

Rp

2.160.991.719,00

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2022 dan 2021 adalah Rp 2.160.991.719,00 dan Rp 1.959.856.934.00,00. Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 10,26% dari Realisasi Belanja Barang TA 2021. Hal ini disebabkan oleh kenaikan yang signifikan pada belanja barang nonoperasional berupa kenaikan honorarium wakil kerja penjaga aset eks BPPN. Selain itu, terdapat kenaikan pada belanja barang persediaan seiring bertambahnya kebutuhan pegawai terhadap alat tulis kantor, dan kenaikan belanja pemeliharaan untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama.

Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.011.527.962	1.048.060.503	(3,49)
Belanja Barang Nonoperasional	465.578.750	281.241.000	65,54
Belanja Jasa	4.813.793	18.446.776	(73,90)
Belanja Pemeliharaan	241.099.999	193.866.747	24,36
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	282.233.923	295.234.408	(4,40)
Belanja Barang Persediaan	155.737.292	124.367.500	25,22
Jumlah Belanja Kotor	2.160.991.719	1.961.216.934	10,19
Pengembalian Belanja		1.360.000	(100,00)
Jumlah Belanja	2.160.991.719	1.959.856.934	10,26

Belanja Modal

Rp 0

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 28.812.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan TA 2021 disebabkan tidak adanya anggaran belanja modal.

Perbandingan Belanja Modal TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	28.812.000	100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	0,00
Belanja Modal Lainnya	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	28.812.000	100,00
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	28.812.000	100,00

B.5.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Perbandingan Belanja Modal TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0,00
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	-	0,00

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 adalah sebesar Rp 0, mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 sebesar Rp 28.812.000,00 dikarenakan tidak terdapat usulan belanja modal peralatan dan mesin untuk TA 2022.

Perbandingan Belanja Modal TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Sice	-	7.420.000	100,00
Lemari Es	-	2.549.000	100,00
CCTV	-	18.843.000	100,00
Jumlah Belanja Kotor	-	28.812.000	100,00
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	28.812.000	100,00

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Perbandingan Belanja Modal TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
Pagar Permanen	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0,00
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	-	0,00

B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Perbandingan Belanja Modal TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Jaringan	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0,00
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	-	0,00

B.5.5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Belanja Bantuan Sosial

B.6. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021 adalah

Rp 0

masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Perbandingan Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0,00
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	-	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar

Rp

38.014.965.365,00

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 38.014.965.365,00 dan Rp 43.831.823.751,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara

Pengeluaran

Rp 0

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TA 2022	TA 2021
Saldo UP	-	-
Kuitansi UP	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara

Penerimaan

Rp 4.834,00

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar masing-masing sebesar Rp 4.834,00 dan Rp 0.

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo kas di Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta V bersumber dari pendapatan jasa giro rekening valas dan telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 2 Januari 2023 dengan nomor NTPN 1A93F0N9VQPUE8AE.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TA 2022	TA 2021
Pendapatan Jasa Lainnya	4.834	-
Jumlah	4.834	-

Kas Lainnya dan

Setara Kas

Rp

37.173.017.420,00

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 37.173.017.420,00 dan Rp 40.405.250.002,00.

Kas Lainnya dan Setara kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP dan kas pada bendahara penerimaan yang merupakan dana pihak ketiga. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	TA 2022	TA 2021
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	37.173.017.420	40.405.250.002
Jumlah	37.173.017.420	40.405.250.002

Kas Lainnya dan Setara Kas yang ada pada rekening Bendahara Penerimaan berupa uang jaminan lelang milik BUMN / Swasta / Pihak ketiga lainnya yang belum dipindahbukukan/ditransfer ke pihak yang berhak serta dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi per 31 Desember 2022.

Piutang Bukan

Pajak

Rp 0

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Piutang Bukan Pajak

Keterangan	TA 2022	TA 2021
-	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar

Tagihan TP/TGR

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Rp 0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

No	Nama	TA 2022	TA 2021
1		-	-
Jumlah		-	-

Bagian Lancar TPA

Rp 0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	TA 2022	TA 2021
1		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang

Tak Tertagih–

Piutang Lancar

Rp 0

C.1.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar di Muka
Rp 0

C.1.8. Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	TA 2022	TA 2021
-	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Rp 416.640.000,00

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 416.640.000,00 dan Rp 2.926.022.222,00.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis

pendapatan adalah sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Jenis	TA 2022	TA 2021
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	416.640.000	2.926.022.222
Jumlah	416.640.000	2.926.022.222

Pendapatan bea lelang pejabat lelang kelas I tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta V dan telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 2 Januari 2023 dengan nomor NTPN: 1A93F0N9VQPUE8AE dan B4E591JNFLCARNOP.

Persediaan

Rp 425.303.111,00

C.1.10. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 425.303,111,00 dan Rp 500.551.527,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	TA 2022	TA 2021
Barang Konsumsi	425.303.111	500.551.527
Jumlah	425.303.111	500.551.527

Aset Tetap

Rp 348.782.275,00

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 348.782.275,00 dan Rp 381.489.120,00. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap KPKNL Jakarta V terdiri dari Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah

Rp 0

C.2.1. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki KPKNL Jakarta V per

31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0
Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	-
Mutasi tambah:	
- Pembelian	-
Mutasi kurang:	
- Revaluasi Aset	-
Saldo per 31 Desember 2022	-

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1			-
Jumlah			-

Peralatan dan

Mesin

Rp

4.008.402.189,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 4.008.402.189,00 dan Rp 3.891.425.315,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	3.891.425.315
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	146.095.000
Mutasi kurang:	
Penghentian Penggunaan BMN	29.118.126
Saldo per 31 Desember 2022	4.008.402.189
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2022	(3.682.472.814)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	325.929.375

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Transfer masuk 11 unit komputer unit (laptop) senilai Rp 141.095.000,00
- Transfer masuk 1 unit peralatan komputer (tablet PC) senilai Rp 4.900.000,00

Mutasi transaksi pengurangan peralatan dan mesin berupa penghentiaan penggunaan BMN senilai Rp 29.118.126,00 yang terdiri dari:

- 2 unit alat rumah tangga senilai Rp 2.640.000,00
- 2 unit komputer unit senilai Rp 21.997.000,00
- 3 unit peralatan komputer senilai Rp 4.501.126,00

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada

Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan
Rp 0*

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 0 dan Rp 0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	-
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
- Revaluasi Aset	-
Saldo per 31 Desember 2022	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

*Jalan, Irigasi, dan
Jaringan
Rp 0*

C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	-
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
- Revaluasi Aset	-
Saldo per 31 Desember 2022	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

*Aset Tetap Lainnya
Rp 22.852.900,00*

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 22.852.900,00 dan Rp 22.852.900,00. Aset Tetap tersebut berupa barang perpustakaan tercetak. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini per 31 Desember 2022.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	22.852.900
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	
Mutasi kurang:	
Penghentian Penggunaan BMN	
Saldo per 31 Desember 2022	22.852.900
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2022	
Nilai Buku per 31 Desember 2022	22.852.900

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp 0

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp
3.682.472.814,00

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp 3.682.472.814,00 dan Rp 3.532.789.095,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.008.402.189	3.682.472.814	325.929.375
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	22.852.900	-	22.852.900
Akumulasi Penyusutan		4.031.255.089	3.682.472.814	348.782.275

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Piutang Jangka Panjang
Rp 0

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Tagihan TP/TGR
Rp 0

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	TA 2021	TA 2020
1		-	-
Jumlah		-	-

Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp 0

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian TPA

No	Debitur	TA 2022	TA 2021
1		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih–
Piutang Jangka
Panjang
Rp 0

C.3.3. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan

TPA atau TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Aset Lainnya

Rp 0

C.4 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya KPKNL Jakarta V terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain. Saldo Aset Lainnya KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada KPKNL Jakarta V terdiri dari Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud

Rp 0

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	-
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
-	-
Saldo per 31 Desember 2021	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud

Uraian	Nilai
-	-
Jumlah	-

Aset Lain-lain

Rp. 29.118.000,00

C.4.2. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp 29.118.000,00 dan Rp 0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	-
Mutasi tambah:	
-Penghentian Penggunaan	29.118.000
Mutasi kurang:	
-Penjualan Melalui Lelang	
Saldo per 31 Desember 2021	29.118.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(29.118.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi

Penyusutan dan

Amortisasi Aset

Lainnya

Rp 29.118.000,00

C.4.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 29.118.000,00 dan Rp 0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per

31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	29.118.000	29.118.000	-
Akumulasi Penyusutan		29.118.000	29.118.000	-

Kewajiban Jangka

Pendek

Rp

37.173.017.420,00

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek KPKNL Jakarta V per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 37.173.017.420,00 dan Rp 40.405.250.002,00.

Uang Muka dari

KPPN

Rp 0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada

Pihak Ketiga

Rp

37.173.017.420,00

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 37.173.017.420,00 dan Rp 40.405.250.002,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada KPKNL Jakarta V per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Utang Kepada Pihak Ketiga	37.173.017.420	Dana milik BUMN/swasta/pihak ketiga lainnya yang belum dipindahbukukan/ditransfer ke pihak yang berhak serta dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi

Pendapatan

Diterima di Muka

Rp 0

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah
-	-
Total	-

Beban yang Masih

Harus Dibayar

Rp 0

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 0 dan Rp 0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar

Uraian	TA 2022	TA 2021
	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas

Rp

1.190.447.004,00

C.6. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 1.190.447.004,00 dan Rp 3.808.062.869,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB

Rp

42.739.871.737,00

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 42.739.871.737,00 dan Rp 55.533.434.045,00.

Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIK
Pendapatan Negara Bukan Pajak:			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	42.739.871.737	55.533.434.045	(23,04)
Jumlah	42.739.871.737	55.533.434.045	(23,04)

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya meliputi Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I, Pendapatan Bea Lelang Pegadaian, Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil, Pendapatan Anggaran lain-lain serta Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) yang bersumber dari dana mengendap pada rekening bendahara penerimaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022.

Beban Pegawai

Rp 0

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	-	-	0,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	0,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	0,00
Beban Tunj. Anak PNS	-	-	0,00
Beban Tunj. Struktural PNS	-	-	0,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	-	0,00
Beban Tunj. PPh PNS	-	-	0,00
Beban Tunj. Beras PNS	-	-	0,00
Beban Tunjangan Umum PNS	-	-	0,00
Beban Uang Makan	-	-	0,00
Beban Lembur	-	-	0,00
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	0,00
Pengembalian Beban Uang Lembur	-	-	0,00
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-	-	0,00
Jumlah	-	-	0,00

Beban Persediaan
Rp 230.985.708,00

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 230.985.708,00 dan Rp 119.049.833,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	230.985.708	119.049.833	94,02
Beban Perseidaiaan Pita Cukai, Materai, dan Leges	-	-	0,00
Jumlah	230.985.708	119.049.833	94,02

Beban Barang dan
Jasa
Rp
1.482.203.721,00

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 1.482.203.721,00 dan Rp 1.346.385.174,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau

jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	649.391.706	694.325.379	(6,47)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	31.965.875	24.387.400	31,08
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	208.056.000	209.830.800	(0,85)
Beban Barang Operasional Lainnya	36.396.900	37.774.000	(3,65)
Beban Bahan	18.648.750	5.267.000	254,07
Beban Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	85.717.481	80.695.984	6,22
Beban Barang Nonoperasional Lainnya	446.930.000	275.974.000	61,95
Beban Langganan Telepon	3.524.009	3.015.531	16,86
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.573.000	15.115.080	(89,59)
Beban Sewa	-	-	
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	0,00
Jumlah	1.482.203.721	1.346.385.174	10,09

Beban

Pemeliharaan

Rp 241.099.999,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 241.099.999,00 dan Rp 193.866.747,00

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	241.099.999	193.866.747	24,36
Jumlah	241.099.999	193.866.747	24,36

Beban Perjalanan

Dinas

Rp 282.233.923,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 282.233.923,00 dan Rp 293.874.408,00.

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk

perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	133.983.923	174.874.408	(23,38)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	148.250.000	119.000.000	24,58
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	-	-	0,00
Jumlah	282.233.923	293.874.408	(3,96)

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp 0*

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan pelaporan. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
-	-	-	0,00
Jumlah	-	-	0,00

*Beban Bantuan
Sosial
Rp 0*

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp 0 dan Rp 0.

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Rincian Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
-	-	-	0,00
Jumlah	-	-	0,00

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp 169.964.970,00*

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 169.964.970,00 dan Rp 179.968.927,00.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	169.964.970	179.968.927	(5,56)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00
Jumlah Penyusutan	169.964.970	179.968.927	(5,56)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	0,00
Jumlah Amortisasi	-	-	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	169.964.970	179.968.927	(5,56)

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp 0*

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing

sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2022 dan 2021*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	-	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Nonlancar	-	-	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	0,00

*Surplus/Defisit
dari Kegiatan
Nonoperasional
Rp 0*

D.11. Kegiatan Nonoperasional

Pos Surplus dari Kegiatan Nonoperasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Nonoperasional pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Nonoperasional per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-	8.289.900	(100,00)
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Nonoperasional	-	8.289.900	(100,00)

*Pos Luar Biasa
Rp 0*

D.12. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan, dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
-	-	-	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	0,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp

3.808.062.869,00

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 3.808.062.869,00 dan Rp 1.026.516.802,00.

Surplus LO

Rp

40.333.383.416,00

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 40.333.383.416,00 dan Rp 53.408.578.856,00. Surplus LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan nonoperasional, sampai dengan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif

Perubahan Kebijakan

Akuntansi/ Kesalahan

Mendasar

Rp 0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021.

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp 0

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp 0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah

sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2022

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan Lainnya	-

Selisih Revaluasi

Aset Tetap

Rp 0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Koreksi Aset Tetap

Nonrevaluasi

Rp 0

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Nonrevaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2022

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-lain

Rp 0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain TA 2022

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi Antar

Entitas

Rp

(42.950.999.281,00)

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp (42.950.999.281,00) dan Rp (50.627.032.789,00). Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas TA 2022

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	45.249.249.125
Ditagihkan ke Entitas Lain	(2.160.991.719)
Transfer Masuk	(137.258.125)
Transfer Keluar	-
Pengesahaan Hibah Langsung	-
Pengesahaan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	(42.950.999.281)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp 45.249.249.125,00 sedangkan DKEL sebesar Rp 2.160.991.719,00.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar

Rp 137.258.125,00 terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk TA 2022

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	Kantor Pusat DJKN	(146.095.000)
2	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		8.836.875
Jumlah			(137.258.125)

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 0.

Ekuitas Akhir

Rp

1.190.447.004,00

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 1.190.447.004,00 dan Rp 3.808.062.869,00

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

A. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 271/KMK.01/2007 tentang pelimpahan wewenang kepada pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan untuk dan atas nama menteri keuangan menetapkan keputusan menteri keuangan tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang, pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara, pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran di lingkungan Kementerian Keuangan, maka dibentuklah jajaran baru Pejabat Pengelola Keuangan Satker sebagai Berikut:

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Adriana Viveryanti
Pejabat Pembuat Komitmen	: Hari Santosa
PPSPM	: Artho Guntoro
Bendahara Pengeluaran	: Abdul Rajab Nasution
Bendahara Penerimaan	: Havivi Natapura

B. Revisi DIPA telah dilakukan 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi Pertama

Pada bulan Februari 2022 merupakan Revisi Kewenangan Kanwil Perbendaharaan DKI Jakarta dalam rangka penyesuaian Belanja Barang dan penyesuaian Rincian Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA.

2. Revisi Kedua

Pada bulan April 2022 yang merupakan Revisi

Kewenangan Kanwil Perbendaharaan DKI Jakarta dalam rangka penyesuaian Belanja Barang dan penyesuaian Rincian Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA

3. Revisi Ketiga

Pada bulan April 2022 yang merupakan Revisi Kewenangan DJA dalam rangka penambahan anggaran Top Down Pengelolaan Aset BUN.

4. Revisi Keempat

Pada bulan Juli 2022 yang merupakan Revisi Kewenangan DJA dalam rangka penambahan anggaran Top Down Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset dan Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK).

5. Revisi Kelima

Pada bulan Oktober 2022 yang merupakan Revisi Kewenangan Kanwil Perbendaharaan DKI Jakarta dalam rangka penyesuaian Belanja Barang dan penyesuaian Rincian Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA dan penambahan volume Klasifikasi Rincian Output (KRO).

LAMPIRAN